



POLITIK KEKUASAAN DALAM GEREJA: PERSPEKTIF TEOLOGIS ATAS DAMPAKNYA TERHADAP KEPEMIMPINAN JEMAAT

Royke Lantupa Kumowal¹
Sekolah Tinggi Teologi Anderson Manado,¹
rlkumowal@gmail.com

Article History:

Submitted:

11/03/2025

Revised:

29/04/2025

Published:

30/04/2025

Volume 02, No. 1
April 2025

e-ISSN 3063-6663
<https://orthotomeo.web.id/index.php/ort>

Halaman 52-73

Abstract

Power politics within the church is a phenomenon that can significantly influence congregational leadership. Unhealthy competition, negative campaigning, and manipulation during leadership elections often lead to church division, decreased ministry effectiveness, and loss of trust in ecclesiastical authority. This study aims to examine the phenomenon of power politics in the church from a Christian theological perspective and to analyze its impact on church leadership. Using theological analysis and literature review methods, this research highlights how Christian leadership principles—such as servant leadership (Matthew 20:25–28) and the avoidance of selfish ambition (Philippians 2:3–4)—can serve as solutions to the dynamics of power struggles within the church. The findings indicate that implementing healthy leadership principles, maintaining transparency in leadership selection, and ensuring the active role of the senior pastor in upholding leadership integrity are essential steps in building a harmonious and service-oriented church. Therefore, the church must uphold leadership values rooted in love and truth to create a spiritually stable and growing community. This research is expected to make a meaningful contribution to the church in developing biblical leadership models, preventing internal conflicts, and strengthening the witness of the body of Christ in society.

Keywords: Church Power Politics, Congregational Leadership, Christian Theology, Church Leadership, Leadership Conflict.

Abstrak

Politik kekuasaan dalam gereja merupakan fenomena yang dapat memengaruhi kepemimpinan jemaat secara signifikan. Persaingan tidak sehat, kampanye negatif, serta manipulasi dalam pemilihan pemimpin gereja sering kali menimbulkan perpecahan jemaat, menurunnya efektivitas pelayanan, dan hilangnya kepercayaan terhadap otoritas gerejawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena politik kekuasaan dalam gereja dari perspektif teologi Kristen serta menelaah dampaknya terhadap kepemimpinan jemaat. Dengan menggunakan metode analisis teologis dan kajian pustaka, penelitian ini menyoroti bagaimana prinsip kepemimpinan Kristiani, seperti kepemimpinan sebagai pelayanan (Matius 20:25-28) dan penghindaran ambisi egois (Filipi 2:3-4), dapat menjadi solusi dalam mengatasi dinamika politik kekuasaan dalam gereja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kepemimpinan yang sehat, transparansi dalam pemilihan pemimpin, serta peran aktif gembala sidang dalam menjaga integritas kepemimpinan merupakan langkah-langkah penting dalam membangun gereja yang harmonis dan berorientasi pada pelayanan. Oleh karena itu, gereja perlu menegakkan nilai-nilai kepemimpinan yang berlandaskan kasih dan kebenaran untuk menciptakan komunitas yang stabil dan bertumbuh secara spiritual. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi nyata bagi gereja dalam membangun pola kepemimpinan yang alkitabiah, mencegah konflik internal, serta memperkuat kesaksian tubuh Kristus di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Politik Kekuasaan Gereja, Kepemimpinan Jemaat, Teologi Kristen, Kepemimpinan Gerejawi, Konflik Kepemimpinan..



PENDAHULUAN

Gereja sebagai institusi keagamaan yang memiliki peran fundamental dalam membimbing kehidupan spiritual umat. Namun dalam kenyataannya, gereja tidak sepenuhnya terbebas dari dinamika politik kekuasaan yang kerap muncul dalam organisasi sosial. Fenomena seperti pemilihan pengurus yang tidak sehat, penggunaan hasutan negatif, serta upaya menjatuhkan lawan menjadi permasalahan yang sering terjadi di berbagai gereja, baik di tingkat lokal maupun nasional. Fenomena seperti pemilihan pengurus yang tidak sehat, penggunaan hasutan negatif, serta upaya menjatuhkan lawan merupakan permasalahan yang kerap terjadi di berbagai gereja, baik di tingkat lokal maupun nasional. Salah satu contoh nyata dapat ditemukan dalam Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Sebagaimana dikemukakan oleh Sinurat, proses pemilihan pemimpin di lingkungan HKBP kerap disertai praktik-praktik manipulatif seperti gratifikasi, intimidasi, janji-janji politik, *black campaign*, serta pembentukan tim sukses guna memenangkan calon tertentu. Ambisi untuk meraih kekuasaan demi akses terhadap uang, pengaruh, dan fasilitas menjadi faktor pendorong utama dari dinamika tersebut—yang pada akhirnya bertentangan dengan nilai-nilai firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Pengkhotbah 5:9 dan 1 Timotius 6:10. Ketika kekuasaan lebih diutamakan daripada panggilan pelayanan, maka yang muncul adalah praktik politik balas jasa serta perpecahan internal yang berpotensi merusak tatanan kehidupan bergereja.¹ Kondisi ini menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kepemimpinan gereja dan keharmonisan jemaat. Dalam konteks Indonesia, dinamika ini semakin kompleks karena adanya keterkaitan antara kepemimpinan gereja dan budaya politik lokal yang sering kali ikut membentuk pola kepemimpinan di dalamnya.²

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa konflik kekuasaan dalam gereja dapat berakhir pada fragmentasi internal dan melemahnya otoritas moral gereja di mata jemaat. Salah satu studi yang dilakukan oleh Subanar mengungkapkan bahwa di beberapa gereja di Indonesia, pemilihan pengurus sering kali disertai dengan kampanye negatif terhadap kandidat tertentu guna mencegah mereka terpilih.³ Praktik ini tidak hanya merusak integritas proses demokrasi dalam gereja, tetapi juga berpotensi memecah belah jemaat, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya partisipasi dan keterlibatan anggota dalam kehidupan gereja. Selain itu, penelitian Yunanto dan Damayanti

¹ Rodlany A Lbn Tobing, "Manjompot na Sinurat: Mencegah Konflik Perebutan Kekuasaan di Gereja dalam Pemilihan Pemimpin Tertinggi HKBP," *Jurnal Teologi Rahmat* 6, no. 2 (2020): 78–91, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/84433728/10-libre.pdf?1650333934=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DManjompot_Na_Sinurat_Mencegah_Konflik_Pe.pdf&Expires=1743822667&Signature=GEf9fmkIRtfgULUI7ysvf6IEpliKEO1NRvdw1QFnUu7OzVN4M6v7DiUPO9.

² Sri Dwi Harti et al., "Politics Identity in Christian Perspective and the Implication for Christian Politicians in Indonesia.," *Pharos Journal of Theology* 104, no. 4 (2023).

³ Gregorius Budi Subanar, "THE DYNAMICS OF THE CATHOLIC CHURCH IN INDONESIA," *Gema Teologi* 32, no. 1 (April 2008).

menyoroti bagaimana provokasi negatif dalam kepemimpinan gereja dapat menciptakan polarisasi di dalam tubuh jemaat, sehingga menghambat pertumbuhan spiritual komunitas gerejawi.⁴

Dinamika politik kekuasaan yang terjadi di gereja juga menampilkan bagaimana kandidat yang tidak terpilih dalam pemilihan pengurus sering kali melakukan tindakan destruktif terhadap kepemimpinan yang sah. Dalam banyak kasus, mereka tidak hanya menolak untuk mendukung program yang dirancang oleh pemimpin terpilih, tetapi juga berusaha menggagalkan kebijakan gereja dengan menggalang dukungan dari kelompok jemaat tertentu. Fenomena ini diamati oleh Hoon, yang mencatat bahwa konflik internal dalam kepemimpinan gereja dapat berujung pada terbentuknya faksi-faksi di dalam komunitas jemaat. Akibatnya, gereja tidak lagi menjadi tempat yang kondusif untuk pembinaan rohani, melainkan menjadi ajang pertarungan kepentingan yang justru menjauhkan gereja dari nilai-nilai Kristiani yang mendasarinya.⁵

Meskipun telah terdapat berbagai penelitian yang membahas dinamika kekuasaan dalam gereja, sebagian besar kajian yang ada lebih banyak menyoroti aspek sosiologis dan politik tanpa memberikan sudut pandang teologis yang mendalam mengenai bagaimana ajaran gereja dapat digunakan untuk mengatasi konflik kepemimpinan ini. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Arifianto menunjukkan bahwa budaya politik lokal sering kali ikut mempengaruhi struktur kepemimpinan gereja, namun penelitian tersebut tidak mengkaji bagaimana perspektif teologis dapat memberikan solusi terhadap tantangan ini.⁶ Demikian pula, studi oleh Bashri menggarisbawahi pentingnya etika dalam kepemimpinan gereja, tetapi belum eksplisit membahas bagaimana prinsip-prinsip teologi dapat diterapkan untuk mengelola konflik dalam pemilihan pengurus gereja.⁷ Oleh karena itu, masih terdapat kesenjangan dalam penelitian yang perlu dijembatani melalui kajian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara teologi dan dinamika kekuasaan dalam gereja.

Dalam kehidupan gereja, kepemimpinan memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas spiritual, sosial, dan administrasi jemaat. Namun, politik kekuasaan yang terjadi dalam gereja sering kali menyebabkan konflik internal yang berdampak negatif pada kepemimpinan dan keharmonisan jemaat. Politik kekuasaan dalam gereja dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti persaingan jabatan, provokasi negatif, serta manipulasi dalam pemilihan pemimpin, yang dapat melemahkan otoritas kepemimpinan gereja dan menghambat efektivitas pelayanan. Oleh karena itu, penelitian ini

⁴ Sri Yunanto dan Angel Damayanti, "Religion and Power: Comparing Political Landscape in the Religious Conflicts in Poso and Maluku," *Advances in Politics and Economics* 5, no. 1 (Januari 28, 2021): p99, diakses Maret 10, 2025, <http://www.scholink.org/ojs/index.php/appe/index>.

⁵ Chang-Yau Hoon, "Religious aspirations among urban Christians in contemporary Indonesia," *International Sociology* 31, no. 4 (Juli 2016): 413–431.

⁶ Alexander Arifianto, "Faith, Moral Authority, and Politics: The Making of Progressive Islam in Indonesia," *Academia.edu*.

⁷ Yanto Bashri, "Kiai in Indonesian Social-Political Changes," *Journal of Nahdlatul Ulama Studies* 2, no. 1 (2021): 67–88.

berusaha menjawab pertanyaan utama: bagaimana politik kekuasaan dalam gereja memengaruhi kepemimpinan jemaat? Selain itu, penting untuk memahami lebih lanjut bagaimana konflik kepemimpinan yang dipicu oleh politik kekuasaan berdampak pada efektivitas pelayanan dan stabilitas gereja. Dengan demikian, penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan: apa saja dampak politik kekuasaan terhadap efektivitas kepemimpinan jemaat dalam gereja? Dari perspektif teologi Alkitabiah, kepemimpinan gereja seharusnya berlandaskan pada prinsip pelayanan, kasih, dan integritas moral, sebagaimana yang diajarkan dalam *Matius 20:25-28* dan *Filipi 2:3-4*, yang menekankan bahwa seorang pemimpin harus mengutamakan pelayanan daripada kepentingan pribadi. Namun, dalam praktiknya, banyak gereja masih menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan pertanyaan: bagaimana perspektif teologis menjelaskan fenomena politik kekuasaan dalam gereja dan kaitannya dengan kepemimpinan jemaat? Lebih jauh, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, tetapi juga memberikan solusi bagi gereja dalam membangun kepemimpinan yang sehat dan bebas dari praktik politik yang merusak. Untuk itu, penelitian ini juga mengajukan pertanyaan: bagaimana prinsip kepemimpinan gereja menurut perspektif teologi dapat menjadi solusi dalam mengatasi dampak politik kekuasaan terhadap kepemimpinan jemaat? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman tentang kepemimpinan gereja yang sehat dan menciptakan solusi konkret yang dapat diterapkan dalam kehidupan bergereja.

Penelitian ini bertujuan untuk memberi sudut pandang teologis tentang praktik kekuasaan dalam gereja, khususnya dalam pemilihan pengurus dan pimpinan jemaat, dengan pendekatan teologis guna menemukan model kepemimpinan yang tidak hanya efisien secara organisasi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keadilan, partisipasi, dan pelayanan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan teologi praktis dengan menyediakan kerangka kerja bagi gereja dalam mengelola kepemimpinan secara lebih sehat dan transparan. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pemimpin gereja, pengajar, dan jemaat dalam memahami serta mengelola dinamika kekuasaan agar terhindar dari konflik yang merusak, meningkatkan keterlibatan jemaat, dan membangun komunitas gerejawi yang lebih harmonis dan berdaya guna.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menyoroti perspektif teologis tertentu, yang bertujuan untuk memahami fenomena politik kekuasaan dalam gereja serta dampaknya terhadap kepemimpinan jemaat dari perspektif teologi Kristen. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk menggali makna, nilai, dan prinsip kepemimpinan

gereja yang sesuai dengan ajaran Alkitab, sehingga memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan antara politik kekuasaan dan kepemimpinan gereja.

Penulis mengumpulkan data melalui kajian pustaka, yang mencakup berbagai sumber akademik seperti jurnal teologi, buku kepemimpinan Kristen, serta penelitian terdahulu yang membahas konflik kepemimpinan dalam gereja. Kajian pustaka ini dilakukan untuk mengidentifikasi pola politik kekuasaan yang terjadi di dalam gereja serta dampaknya terhadap kehidupan jemaat. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan prinsip-prinsip kepemimpinan gereja yang sehat menurut perspektif teologi Alkitabiah dengan mengacu pada ajaran-ajaran yang relevan dalam Alkitab, seperti *Matius 20:25-28* (kepemimpinan sebagai pelayanan), *Filipi 2:3-4* (menghindari ambisi egois), dan *1 Timotius 3:1-7* (standar kepemimpinan gereja yang sehat).

Penulis menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk mendeskripsikan fenomena politik kekuasaan dalam gereja dan mengkaji dari perspektif teologi Kristen. Data yang diperoleh dari berbagai sumber diolah menggunakan pendekatan analisis konsep guna memahami dampaknya terhadap kepemimpinan jemaat, prinsip kepemimpinan gereja yang sehat sebagai solusinya. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam teologi kepemimpinan gereja serta memberikan rekomendasi praktis bagi gereja dalam membangun sistem kepemimpinan yang lebih sehat, transparan, dan berorientasi pada pelayanan sesuai dengan prinsip Alkitab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Politik Kekuasaan dalam Gereja

Fenomena politik kekuasaan dalam gereja merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh banyak komunitas Kristen, termasuk di Indonesia. Gereja sebagai institusi keagamaan idealnya menjadi tempat yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, kebersamaan, dan pelayanan. Namun dalam praktiknya, perebutan posisi kepemimpinan dan pengaruh dalam gereja sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik yang tidak sehat. Studi oleh Djawa, Baun, dan Saingo menunjukkan bahwa di beberapa gereja di Indonesia, kekuasaan sering menjadi alat bagi individu atau kelompok tertentu untuk memperkuat posisi mereka, bukan semata-mata untuk pelayanan kepentingan, tetapi juga demi kontrol atas sumber daya dan pengaruh dalam komunitas jemaat.⁸

Salah satu contoh nyata dari politik kekuasaan dalam gereja di Indonesia dapat ditemukan dalam konflik kepemimpinan di beberapa gereja Kristen dan Katolik. Misalnya, dalam beberapa kasus pemilihan majelis gereja atau pendeta, terjadi persaingan yang tidak sehat di mana calon pemimpin tertentu mengalami serangan pribadi melalui gosip atau kampanye negatif agar mereka

⁸ Maya Djawa, Nofriana Baun, dan Yakobus Adi Saingo, "Manajemen Pendidikan Politik Menurut Martin Luther," *Jurnal Media Informatika* 6, no. 2 (2024): 447–452.

tidak terpilih. Situasi ini tidak jarang berakhir pada perpecahan internal, di mana jemaat terpecah menjadi beberapa kelompok yang saling berseberangan.

Penelitian oleh Djawa, Baun, dan Saingo juga menyoroti bahwa dalam beberapa gereja, kepemimpinan sering kali dipegang oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuatan finansial dan jaringan politik yang luas.⁹ Hal ini menyebabkan pemilihan kepemimpinan gereja menjadi tidak transparan dan lebih banyak dipengaruhi oleh lobi-lobi internal daripada pertimbangan spiritual dan moral. Akibatnya, gereja yang seharusnya menjadi tempat pelayanan justru menjadi ajang pertarungan kepentingan yang sering kali mengorbankan seluruh jemaat. Penelitian lain oleh Laia dan Halawa juga menemukan bahwa di beberapa daerah di Indonesia, kekuasaan gerejawi kerap dipolitisasi sehingga gereja kehilangan independensinya sebagai institusi keagamaan.¹⁰

Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya politik kekuasaan dalam gereja. Salah satu faktor utama adalah ambisi individu atau kelompok tertentu untuk mendapatkan posisi kepemimpinan yang memberikan otoritas atas kebijakan dan sumber daya gereja.¹¹ Dalam beberapa kasus, kepemimpinan gereja juga berkaitan dengan aspek ekonomi, seperti pengelolaan dana gereja, aset properti, serta proyek gereja pembangunan, yang menjadikan posisi kepemimpinan menjadi sangat strategis dan diperebutkan.¹²

Selain itu, lemahnya mekanisme akuntabilitas dalam proses pemilihan kepemimpinan gereja juga menjadi faktor pemicu. Banyak gereja yang tidak memiliki aturan yang jelas atau sistem yang adil dalam pemilihan pemimpin, sehingga memungkinkan adanya praktik manipulasi atau intervensi dari kelompok tertentu.¹³ Hal ini menciptakan ketimpangan dalam sistem kepemimpinan, di mana keputusan sering kali diambil berdasarkan kepentingan kelompok tertentu daripada aspirasi seluruh jemaat. Sebuah penelitian oleh Laia dan Halawa juga menemukan bahwa di beberapa gereja, sistem warisan kepemimpinan yang dipengaruhi oleh kolonialisme¹⁴ telah menciptakan model kekuasaan yang cenderung elitis, sehingga kesetaraan dalam kepemimpinan gereja masih menjadi tantangan.¹⁵

⁹ Ibid.

¹⁰ Surimawati Laia dan Yuslina Halawa, "Sejarah Gereja di Indonesia: Peran Misionaris Dalam Penyebaran Kekristenan," *Jurnal Silih Asah* 2, no. 1 (2025): 1–13.

¹¹ Djawa, Baun, dan Saingo, "Manajemen Pendidikan Politik Menurut Martin Luther."

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Penggunaan istilah "kolonialisme" dalam penjelasan tersebut bukan berarti bahwa gereja saat ini secara langsung berada di bawah kekuasaan kolonial, melainkan untuk menunjukkan warisan sistemik atau struktural yang berasal dari masa penjajahan dan masih memengaruhi cara organisasi gereja berfungsi hingga sekarang. Di mana model kekuasaan yang diterapkan cenderung bersifat hierarkis, elitis, dan sentralistik. Model ini meniru sistem pemerintahan kolonial yang mengutamakan otoritas segelintir elit di pusat dan meminimalkan partisipasi umat dalam pengambilan keputusan. Meskipun masa kolonial telah berlalu, pengaruh sistem tersebut masih terasa dalam praktik organisasi gereja masa kini, terutama dalam pola rekrutmen pemimpin dan distribusi kekuasaan, yang kadang tidak mencerminkan prinsip kesetaraan dan akuntabilitas internal.

¹⁵ Laia dan Halawa, "Sejarah Gereja di Indonesia: Peran Misionaris Dalam Penyebaran Kekristenan."

Politik kekuasaan dalam gereja memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan jemaat. Salah satu dampak utama adalah perpecahan di dalam gereja, di mana jemaat menjadi terkotak-kotak berdasarkan dukungan mereka terhadap calon pemimpin tertentu. Hal ini sering kali menyebabkan perbedaan pandangan yang tajam di antara anggota jemaat, yang pada akhirnya berdampak pada keharmonisan dan pertumbuhan spiritual gereja.

Selain itu, politik kekuasaan dalam gereja juga berisiko menurunkan kepercayaan jemaat terhadap institusi gereja. Ketika jemaat melihat bahwa pemilihan kepemimpinan lebih diwarnai oleh politik strategis daripada nilai-nilai spiritual, mereka dapat menjadi skeptis terhadap otoritas gereja dan bahkan memilih untuk meninggalkan komunitas gereja mereka. Hal ini menjadi tantangan besar bagi gereja dalam mempertahankan peran dan fungsinya sebagai wadah pelatihan iman dan pelayanan kepada jemaat. Penelitian oleh Djawa dkk. dan Laia & Halawa di atas menunjukkan bahwa di beberapa gereja yang mengalami konflik kepemimpinan, jumlah jemaat yang aktif terlibat dalam kegiatan gereja mengalami penurunan drastis akibat kecewa terhadap dinamika politik internal yang terjadi.

Untuk mengatasi fenomena ini, gereja perlu menerapkan sistem kepemimpinan yang lebih transparan dan akuntabel. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat mekanisme pemilihan pemimpin gereja yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan keterbukaan. Gereja juga perlu mengembangkan pedoman etis yang jelas bagi para pemimpin gereja, sehingga mereka memahami bahwa kepemimpinan dalam gereja adalah sebuah panggilan untuk melayani, bukan untuk mencari kekuasaan. Di samping itu, penting untuk membangun sistem distribusi kekuasaan yang seimbang antara pengurus, hamba Tuhan, dan seluruh elemen gereja yang terlibat dalam kepemimpinan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada individu atau kelompok tertentu, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan jemaat secara kolektif. Model kepemimpinan yang kolaboratif dan partisipatif akan membantu menciptakan budaya organisasi yang sehat dan mencegah munculnya praktik-praktik manipulatif dalam struktur gereja.

Selain itu, gereja perlu membangun budaya kepemimpinan yang lebih berbasis pada nilai-nilai spiritual daripada sekadar kompetisi politik. Dengan menanamkan prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen yang menekankan kerendahan hati dan pelayanan kepada sesama, gereja dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan harmonis dalam struktur kepeimpinannya. Dalam jangka panjang, hal ini akan membantu gereja untuk tetap menjadi tempat yang mengedepankan nilai-nilai iman dan kebersamaan, serta terhindar dari dinamika politik yang dapat merusak integritas gereja.

Perspektif Teologi Alkitabiah tentang Kepemimpinan dalam Gereja

Kepemimpinan sebagai Pelayanan, Bukan Dominasi (Matius 20:25-28)

Yesus menegaskan dalam *Matius 20:25-28* bahwa kepemimpinan dalam gereja tidak boleh meniru model kepemimpinan duniawi yang berorientasi pada dominasi dan kekuasaan, tetapi harus berlandaskan pada pelayanan kepada sesama. Kepemimpinan gereja seharusnya mengutamakan kasih, pengorbanan, dan pelayanan tanpa pamrih kepada jemaat.

Studi oleh Kurung & Nee dalam *Jurnal Teologi Wesley* menunjukkan bahwa gereja-gereja di Indonesia yang menerapkan model kepemimpinan berbasis pelayanan mengalami pertumbuhan komunitas yang lebih sehat dan meminimalkan konflik internal.¹⁶ Selain itu, penelitian Putrawan & Lumintang dalam *Jurnal Theosophia* menyoroti bahwa kepemimpinan transformasional berbasis pelayanan dalam gereja dapat memperkuat kesatuan jemaat dan meningkatkan keterlibatan aktif anggota gereja.¹⁷ Hasil penelitian ini sejalan dengan prinsip yang diajarkan dalam Alkitab, dimana kepemimpinan dalam gereja seharusnya fokus pada pelayanan. Penelitian ini juga memberikan pemahaman bahwa semakin besar tingkat dominasi dalam kepemimpinan gereja, semakin tinggi pula risiko konflik yang terjadi dalam jemaat. Oleh karena itu, gereja perlu lebih menekankan nilai kepemimpinan yang berlandaskan pelayanan, seperti yang dicontohkan oleh Yesus Kristus.

Menghindari Ambisi Egois dalam Kepemimpinan (Filipi 2:3-4)

Dalam *Filipi 2:3-4*, Paulus menekankan bahwa kepemimpinan dalam gereja harus didasarkan pada kerendahan hati dan bukan ambisi pribadi. Seorang pemimpin gereja harus mengutamakan kepentingan jemaat daripada mencari keuntungan atau kehormatan pribadi.

Penelitian oleh Pasaribu dkk., dalam *Community Development Journal* mengungkap bahwa salah satu penyebab konflik utama dalam kepemimpinan gereja di Indonesia adalah ambisi pribadi yang berlebihan dari calon pemimpin yang lebih mementingkan posisi daripada pelayanan jemaat.¹⁸ Sementara itu, Surbakti & Wattimury dalam *Jurnal Immanuel* menyoroti bagaimana ambisi kepemimpinan yang tidak terkendali dapat mengarah pada perpecahan dalam gereja dan menurunkan

¹⁶ Windi Marandja Kurung et al., "MEMBANGUN GEREJA YANG DINAMIS DI ERA MODERN: ANALISIS PENERAPAN 12 PRINSIP PERTUMBUHAN GEREJA CHARLES PETER WAGNER DI GEREJA BETHEL INDONESIA" *THE SEED* YOGYAKARTA," *Jurnal Teologi Wesley* 1, no. 2 (2024).

¹⁷ Bobby K Putrawan dan Ramly D B Lumintang, "Studi Eksplanatori Kepemimpinan Transformasional Terhadap Keesaan Gereja Sebagai Tubuh Kristus Di Sinode Gereja Kristus Rahmani Indonesia," *THEOSOPHIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 2, no. 2 (2024): 94–103.

¹⁸ Sahat Tua, James Pasaribu, dan Dorozoria Sianturi, "INTERNALISASI PRINSIP KEPEMIMPINAN YANG MENGHAMBA BAGI MAHASISWA INSTITUT AGAMA KRISTEN RENATUS PEMATANG SIANTAR," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 6 (2024): 12859–12865.

kepercayaan jemaat terhadap otoritas gereja.¹⁹ Penelitian ini memberikan wawasan bahwa kepemimpinan gereja yang dilandasi oleh ambisi pribadi tidak hanya berdampak negatif terhadap stabilitas gereja, tetapi juga terhadap kepercayaan jemaat terhadap pemimpin. Oleh karena itu, penting bagi gereja untuk memastikan bahwa calon pemimpin memiliki karakter yang rendah hati dan memiliki panggilan yang murni untuk melayani, bukan sekadar untuk mencapai posisi dalam organisasi gereja.

Lebih lanjut, *Filipi 2:3–4* mengajarkan bahwa pemimpin gereja harus menghindari ambisi egois dan lebih mengutamakan kesejahteraan jemaat dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Namun dalam realitas pelayanan gereja, prinsip ini sering kali diabaikan, terutama ketika muncul politik kekuasaan dalam kepemimpinan gereja. Dalam banyak kasus, politik kekuasaan terjadi karena adanya persaingan tidak sehat yang berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Misalnya, dalam proses pemilihan gembala sidang atau penatua, tidak jarang keputusan didasarkan bukan pada kualitas rohani atau integritas pelayanan calon pemimpin, melainkan pada faktor kedekatan personal, afiliasi kelompok, atau kekuatan lobi internal. Akibatnya, keputusan strategis gereja cenderung menguntungkan kelompok tertentu, sementara suara dan kesejahteraan jemaat secara keseluruhan terabaikan. Fenomena ini jelas bertentangan dengan semangat *Filipi 2:3–4*, yang menekankan pentingnya kerendahan hati dan kesediaan untuk mendahulukan kepentingan orang lain di atas diri sendiri. Di sinilah pentingnya menerapkan standar kepemimpinan yang sehat sebagaimana yang dijelaskan dalam *1 Timotius 3:1-7*, yang menekankan bahwa pemimpin gereja harus memiliki karakter moral yang baik, tidak tamak, tidak sombong, serta memiliki kesaksian yang baik di tengah jemaat. Prinsip-prinsip ini bukan hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga solusi praktis dalam mengatasi politik kekuasaan dalam gereja. Jika setiap pemimpin dipilih berdasarkan standar moral dan spiritual yang tinggi, serta menjalankan tugasnya dengan kerendahan hati dan pelayanan yang tulus, maka politik kekuasaan yang merusak dapat diminimalisir. Dengan demikian, perspektif teologis menunjukkan bahwa fenomena politik kekuasaan dalam gereja dapat diatasi dengan menerapkan prinsip kepemimpinan Kristiani yang benar, yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan, kasih, dan keadilan.

Kriteria Kepemimpinan Gereja yang Sehat (1 Timotius 3:1-7)

Paulus dalam *1 Timotius 3:1-7* memberikan kriteria kepemimpinan gereja yang sehat, termasuk memiliki karakter moral yang baik, tidak tamak, tidak mudah marah, serta memiliki

¹⁹ Costansa Wattimury dan Pelita Hati Surbakti, "Urgensi Standar Kompetensi Pendeta: Tinjauan terhadap Dokumen Standar Kompetensi Pendeta di Sinode Gereja Kristus," *Immanuel: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 5, no. 2 (Oktober 2024): 117–140.

kesaksian yang baik di tengah jemaat. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan gereja harus lebih menitikberatkan pada aspek karakter daripada sekedar kemampuan administratif.

Studi oleh Kolibu dalam *Inculco Journal of Christian Education* menyoroti bagaimana pendidikan teologis yang baik dapat membantu membentuk karakter kepemimpinan gereja yang sesuai dengan standar Alkitab.²⁰ Selain itu, penelitian oleh Manalu dalam *Jurnal Teologi* membahas bagaimana gereja dapat menerapkan seleksi yang lebih ketat dalam memilih pemimpin berdasarkan prinsip-prinsip moral yang diajarkan dalam Alkitab.²¹

Penulis sependapat dengan penjelasan di atas bahwa kriteria kepemimpinan yang sehat menurut 1 Timotius 3:1-7 harus menjadi pedoman utama bagi gereja dalam memilih pemimpin. Pendidikan teologis yang baik menjadi faktor penting dalam membentuk karakter pemimpin gereja yang sesuai dengan standar Alkitab. Oleh karena itu, gereja perlu memperkuat sistem seleksi pemimpin agar individu yang dipilih benar-benar memiliki integritas dan komitmen untuk melayani.

Bahaya Kebijaksanaan Duniawi dalam Kepemimpinan Gereja (Yakobus 3:14-16)

Yakobus dalam *Yakobus 3:14-16* memperingatkan bahwa kepemimpinan yang didorong oleh iri hati dan ambisi duniawi akan menimbulkan kekacauan dan perpecahan dalam jemaat. Gereja yang lebih mengutamakan kebijaksanaan duniawi dalam kepemimpinannya akan kehilangan nilai-nilai spiritual dan lebih menyerupai institusi sosial biasa.

Penelitian oleh Situmorang dalam *Jurnal Lumen* menyoroti bahwa gereja yang mengalami konflik internal akibat kepemimpinan yang tidak sehat sering kali lebih dipengaruhi oleh kebijakan duniawi daripada prinsip pelayanan Alkitabiah.²² Studi oleh Nugroho dkk. dalam *Jurnal Teologi Coram Mundo* juga menemukan bahwa gereja yang dipimpin oleh individu dengan motivasi kekuasaan dan keuntungan pribadi cenderung mengalami degradasi spiritual dan perpecahan komunitas jemaat.²³ Studi ini menguatkan bahwa penerapan kebijakan duniawi dalam kepemimpinan gereja memiliki konsekuensi negatif terhadap stabilitas spiritual dan organisasi gereja. Oleh karena itu, gereja harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip kepemimpinan yang diajarkan dalam Alkitab.

²⁰ Tonny Adrian dan Dirk Roy Kolibu, "TEOLOGI PAK DALAM MEMBENTUK KARAKTER KEPEMIMPINAN PANCASILA: KAJIAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEPEMIMPINAN KRISTEN BERDASARKAN KITAB NEHEMIA," *Inculco Journal of Christian Education* 5, no. 1 (Februari 2025): 61–83.

²¹ R. M. (ROSWELL) RUMKENY, "BIOGRAFI JONATAN PRIBADI: PENGIKUT KRISTUS, GEMBALA SIDANG DAN PEMIMPIN ORGANISASI YANG BERDAMPAK" (Oktober 2024).

²² Meditatio Situmorang, "Tantangan Perkembangan Oikumene di Indonesia," *Lumen: Jurnal Pendidikan Agama Katekese dan Pastoral* 3, no. 2 (2024): 190–202.

²³ Efie Linda Kundjarijati dan Fibry Jati Nugroho, "Peranan Gaya Kepemimpinan terhadap Keterlibatan Generasi Milenial dalam Pelayanan di Jemaat Kristen Indonesia Mahanaim Blitar," *Coram Mundo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 6, no. 2 (2024): 15–27.

Karakter Pemimpin Gereja yang Sesuai dengan Standar Alkitab (Titus 1:7-9)

Dalam *Titus 1:7-9*, Paulus menegaskan bahwa seorang pemimpin gereja harus memiliki karakter yang tidak sombong, tidak serakah, serta mampu mengajarkan kebenaran dengan setia. Hal ini menegaskan bahwa pemimpin gereja harus memiliki integritas moral dan keahlian dalam mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat.

Penelitian oleh Sumual & Kathryn dalam *Jurnal Teologi Rhema* menekankan bahwa standar kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai-nilai Alkitabiah harus menjadi pedoman utama dalam pemilihan pemimpin gereja di Indonesia.²⁴ Selain itu, studi oleh Sianturi dalam *Jurnal Haggadah* membahas bagaimana gereja-gereja di Indonesia dapat membangun sistem kepemimpinan yang lebih berbasis nilai-nilai Kristiani dalam menghadapi tantangan dunia modern.²⁵ Menurut penulis penting bagi gereja untuk memastikan bahwa pemimpin mereka memenuhi standar Alkitabiah. Dengan pemimpin yang memiliki karakter yang sesuai dengan firman Tuhan, gereja akan lebih mampu membangun komunitas yang kuat dan harmonis.

Dari perspektif teologi Alkitabiah, kepemimpinan gereja harus berorientasi pada pelayanan dan bukan dominasi. Pemimpin gereja harus memiliki karakter yang rendah hati, tidak didorong oleh ambisi pribadi, serta berkomitmen untuk melayani jemaat berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Dalam konteks Indonesia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa gereja-gereja yang menerapkan kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai Kristiani cenderung lebih harmonis dan meminimalkan konflik internal, sementara gereja yang dipengaruhi oleh ambisi pribadi dan keputusan duniawi lebih rentan terhadap perpecahan. Oleh karena itu, gereja perlu memperkuat sistem pemilihan pemimpin yang lebih berdasarkan pada standar moral Alkitabiah serta meningkatkan teologi pendidikan bagi calon pemimpin gereja agar dapat menjalankannya dengan penuh integritas.

Dampak Politik Kekuasaan terhadap Kepemimpinan Jemaat

Dalam kehidupan gereja, kepemimpinan seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai pelayanan dan kasih sebagaimana diajarkan dalam Alkitab. Namun, realitas yang terjadi di banyak gereja menunjukkan bahwa politik kekuasaan sering kali menjadi faktor yang menghambat keharmonisan dalam kepemimpinan jemaat. Politik kekuasaan dalam gereja dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti perebutan jabatan, persaingan tidak sehat, serta manipulasi dalam pemilihan pemimpin. Rionaldi mencatat bahwa dualisme kepemimpinan dalam Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)

²⁴ Ivonne Sandra Sumual et al., "Hildegard of Bingen dan Pendidikan Teologi bagi Perempuan: Inspirasi bagi Program Pelatihan Wanita Bethel," *RHEMA: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika* 9, no. 1 (2024): 36–45.

²⁵ Joyanda Sianturi, "Kontribusi Kepemimpinan Pimpinan Sidang Terhadap Pertumbuhan Gereja Pentakosta Indonesia Se-Jabodetabek," *HAGGADAH: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 5, no. 2 (2024): 104–119.

telah menyebabkan ketidakstabilan dalam organisasi gereja dan mempengaruhi kehidupan jemaat secara langsung.²⁶ Konflik tersebut bukan hanya bersifat struktural, tetapi juga berdampak pada relasi sosial jemaat yang terpecah akibat dukungan terhadap pemimpin tertentu.²⁷ Fenomena ini mengindikasikan bahwa politik kekuasaan tidak hanya merusak tatanan gerejawi, tetapi juga mengancam persatuan dalam tubuh Kristus.

Ketika kepemimpinan gereja lebih berorientasi pada kekuasaan daripada pelayanan, berbagai dampak negatif dapat timbul, baik dalam aspek internal gereja maupun dalam persepsi jemaat terhadap otoritas gerejawi. Trisna & Setianto dalam penelitian mereka mengungkapkan bahwa gereja yang mengalami konflik kepemimpinan akibat politik kekuasaan sering kali kehilangan fokus dalam pelayanannya. Jemaat yang terlibat dalam konflik kepemimpinan juga mengalami kebingungan spiritual, karena lebih banyak terlibat dalam urusan politik gereja daripada bertumbuh dalam iman.²⁸ Dalam konteks Alkitabiah, Paulus mengingatkan dalam *1 Korintus 1:10* agar jemaat tetap bersatu dan tidak terpecah-belah akibat pertikaian kepemimpinan: *"Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir."* Namun, dalam praktiknya, banyak gereja yang terjebak dalam persaingan internal sehingga mengabaikan ajaran ini.

Perpecahan dan Polarisasi dalam Gereja

Salah satu dampak utama dari politik kekuasaan dalam gereja adalah perpecahan dan polarisasi di antara jemaat. Persaingan antar kelompok yang mendukung pemimpin tertentu sering kali menyebabkan fragmentasi dalam komunitas gereja, sehingga jemaat terbagi dalam faksi-faksi yang saling bertentangan. Konflik kepemimpinan yang terjadi dalam Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) pada akhir abad ke-20 merupakan contoh nyata bagaimana politik kekuasaan dapat menimbulkan dualisme kepemimpinan dan menciptakan polarisasi di antara jemaat.²⁹ Perpecahan ini bukan hanya terjadi di tingkat kepemimpinan, tetapi juga berimbas pada hubungan antaranggota jemaat yang mulai mempertanyakan otoritas dan visi gereja mereka.

Dalam perspektif Alkitabiah, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk menghindari perpecahan dan tetap bersatu dalam iman: *"Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi*

²⁶ SIJABAT RIONALDI, "KONFLIK DUALISME KEPEMIMPINAN HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN TERHADAP JEMAAT DI KOTA PADANG (1988-1998)" (Universitas Andalas, 2024).

²⁷ Ibid.

²⁸ Bistok Manurung, Robert Paul Trisna, dan Yusak Setianto, "Teologi Persahabatan Kristen dan Dalihan Na Tolu: Integrasi Nilai-Nilai Kultural dalam Konteks Pelayanan," *Matheo: Jurnal Teologi/Kependetaan* 11, no. 2 (2021): 246–259.

²⁹ RIONALDI, "KONFLIK DUALISME KEPEMIMPINAN HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN TERHADAP JEMAAT DI KOTA PADANG (1988-1998)."

nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." (1 Korintus 1:10). Namun, dalam praktiknya, gereja yang terjebak dalam dinamika politik kekuasaan sering kali mengabaikan prinsip ini. Trisna dan Setianto menemukan bahwa gereja yang mengalami konflik kepemimpinan akibat ambisi politik pemimpin cenderung mengalami penurunan partisipasi jemaat dan kehilangan misi spiritual mereka.³⁰

Menurut penulis, temuan dari Rionaldi dan Trisna dan Setianto memperlihatkan bahwa perpecahan yang disebabkan oleh politik kekuasaan dalam gereja bukan hanya sekadar persoalan organisasi, tetapi juga masalah spiritual. Gereja yang mengalami polarisasi sulit menjalankan perannya sebagai tubuh Kristus yang utuh. Penulis berpendapat bahwa gereja perlu menerapkan mekanisme penyelesaian konflik yang berdasarkan ajaran Kristiani, seperti rekonsiliasi dan musyawarah yang berlandaskan kasih dan keadilan. Jika gereja gagal mengelola konflik ini, maka perpecahan akan terus berlanjut, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan rohani jemaat.

Berkurangnya Efektivitas Pelayanan karena Persaingan Tidak Sehat

Ketika politik kekuasaan mendominasi gereja, efektivitas pelayanan sering kali menurun karena fokus pemimpin dan jemaat lebih banyak teralihkan pada persaingan internal daripada pelayanan spiritual. Rionaldi mencatat bahwa dualisme kepemimpinan dalam HKBP menyebabkan ketidaksepakatan dalam pengambilan keputusan, yang berdampak pada terhambatnya berbagai program pelayanan dan sosial yang sebelumnya telah direncanakan.³¹ Hal serupa juga menjadi latar berdirinya Gereja Bethel Indonesia (GBI), ketika Pdt. H.L. Senduk (Ho Liong Seng) bersama sejumlah tokoh lainnya memisahkan diri dari Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) karena ketidakpuasan terhadap struktur kepemimpinan yang dianggap otoriter dan tidak akomodatif terhadap pembaruan pelayanan. Konflik internal dan perbedaan visi mengenai arah penginjilan, pelayanan Roh Kudus, serta otonomi organisasi mendorong lahirnya sinode baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan jemaat. Dengan demikian, pembentukan GBI dari tubuh GPdI tidak hanya mencerminkan perpecahan institusional, tetapi juga merupakan bentuk artikulasi teologis dan strategis dalam menghadirkan model gereja yang lebih kontekstual dan dinamis.³²

³⁰ Manurung, Trisna, dan Setianto, "Teologi Persahabatan Kristen dan Dalihan Na Tolu: Integrasi Nilai-Nilai Kultural dalam Konteks Pelayanan."

³¹ RIONALDI, "KONFLIK DUALISME KEPEMIMPINAN HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN TERHADAP JEMAAT DI KOTA PADANG (1988-1998)."

³² Heppy Yohanes, Yakub Hendrawan Perangin Angin, dan Tri Astuti Yenirenowati, "HL Senduk dan Kegerakan Pentakosta di Indonesia," *Ritornera - Jurnal Teologi Pentakosta Indonesia* 1, no. 3 (Desember 31, 2021): 101–114, <https://ojs.pspindonesia.org/index.php/JPI/article/view/25>.

Ketika politik kekuasaan mendominasi gereja, efektivitas pelayanan sering kali menurun karena fokus pemimpin dan jemaat lebih banyak teralihkan pada persaingan internal daripada pelayanan spiritual. Rantesalu mencatat bahwa konflik dalam gereja sering kali muncul akibat ketidaksepakatan dalam kepemimpinan, yang kemudian berdampak pada integritas pelayanan dan menurunkan efektivitas pengajaran firman Tuhan.³³ Dalam konteks ini, gereja lebih banyak menghabiskan energi untuk menyelesaikan konflik daripada memperkuat misinya dalam penginjilan dan pelayanan sosial.

Dalam perspektif Alkitab, Yesus sendiri mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus mengutamakan pelayanan daripada mempertahankan kekuasaan: "*Barangsiapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.*" (Matius 23:11). Prinsip ini menekankan bahwa kepemimpinan dalam gereja seharusnya berfokus pada melayani jemaat, bukan pada persaingan yang merusak. Simanjuntak & Santo juga menemukan bahwa persaingan antar pemimpin gereja sering kali mengakibatkan stagnasi dalam pertumbuhan jemaat, karena kepercayaan jemaat terhadap otoritas gereja melemah akibat konflik yang terjadi di antara pemimpinnya.³⁴

Penulis setuju dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa politik kekuasaan menghambat efektivitas pelayanan gereja. Seharusnya, kepemimpinan gereja berfokus pada pelayanan kepada jemaat, bukan pada persaingan jabatan. Menurut penulis, gereja yang mengalami konflik kepemimpinan sering kali mengalami stagnasi dalam penginjilan dan pelayanan sosial, karena energi gereja lebih banyak terserap dalam pertikaian internal daripada dalam misi pelayanan. Fenomena ini menunjukkan bahwa gereja perlu membangun sistem kepemimpinan yang lebih transparan dan berbasis pada nilai-nilai Kristiani. Jika gereja terus terjebak dalam konflik kepemimpinan, maka bukan hanya pelayanannya yang terganggu, tetapi juga kepercayaan jemaat terhadap gereja secara keseluruhan.

Menurunnya Kepercayaan Jemaat terhadap Kepemimpinan Gereja

Politik kekuasaan dalam gereja juga berdampak langsung pada tingkat kepercayaan jemaat terhadap kepemimpinan gereja. Ketika jemaat melihat bahwa pemimpin gereja lebih berfokus pada persaingan politik daripada pelayanan spiritual, mereka cenderung kehilangan keyakinan terhadap otoritas gerejawi. Rionaldi menunjukkan bahwa gereja yang mengalami dualisme kepemimpinan,

³³ Marsi Bombongan Rantesalu, "Karakter Kejujuran dalam Gereja Masa Kini," *Jurnal Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 1 (Juni 2020): 43.

³⁴ Dapot Tua Simanjuntak dan Joseph Christ Santo, "Kepemimpinan Gembala Sidang Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Jemaat: Sebuah Refleksi 1 Petrus 5," *Jurnal Paria* 6, no. 1 (2019).

jemaat menjadi lebih skeptis terhadap keputusan pemimpin mereka dan bahkan mulai meninggalkan komunitas gereja karena merasa tidak mendapatkan bimbingan spiritual yang mereka harapkan.³⁵

Dalam perspektif Alkitabiah, Paulus menekankan bahwa seorang pemimpin gereja harus memiliki kesaksian yang baik di mata jemaat dan masyarakat: *"Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu isteri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang."* (1 Timotius 3:2). Ayat ini menunjukkan bahwa pemimpin gereja harus menjaga kredibilitas mereka di hadapan jemaat, bukan justru menimbulkan ketidakpercayaan akibat perilaku politik yang tidak sehat.

Politik kekuasaan dalam gereja juga berdampak langsung pada tingkat kepercayaan jemaat terhadap kepemimpinan gereja. Ketika jemaat melihat bahwa pemimpin gereja lebih berfokus pada persaingan politik daripada pelayanan spiritual, mereka cenderung kehilangan keyakinan terhadap otoritas gerejawi. Tafonao mencatat bahwa salah satu penyebab utama menurunnya kepercayaan jemaat terhadap pemimpin gereja adalah konflik internal yang berkepanjangan. Jemaat yang merasa pemimpin gereja lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kesejahteraan jemaat cenderung menjadi skeptis terhadap institusi gereja secara keseluruhan.³⁶

Dalam perspektif Alkitabiah, Paulus menekankan bahwa seorang pemimpin gereja harus memiliki kesaksian yang baik di mata jemaat dan masyarakat: *"Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu isteri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang."* (1 Timotius 3:2). Ayat ini menunjukkan bahwa pemimpin gereja harus menjaga kredibilitas mereka di hadapan jemaat, bukan justru menimbulkan ketidakpercayaan akibat perilaku politik yang tidak sehat. Rante & Baaka dalam penelitian mereka menemukan bahwa pemimpin gereja yang gagal mengelola konflik dengan baik justru memperburuk situasi dengan menurunkan kepercayaan jemaat dan menciptakan polarisasi lebih lanjut dalam komunitas gereja.³⁷

Menurut penulis, kepercayaan jemaat terhadap kepemimpinan gereja adalah faktor penting dalam keberlanjutan pelayanan gereja. Jika pemimpin gereja lebih berfokus pada politik kekuasaan daripada pelayanan, maka jemaat akan kehilangan rasa hormat dan kepercayaan terhadap mereka. Penulis sependapat dengan Tafonao dan Rante & Baaka bahwa konflik internal yang berkepanjangan dalam gereja dapat menyebabkan jemaat menjauh dari gereja dan mencari komunitas lain yang lebih stabil. Oleh karena itu, gereja perlu membangun kembali kepercayaan jemaat dengan meningkatkan

³⁵ RIONALDI, "KONFLIK DUALISME KEPEMIMPINAN HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN TERHADAP JEMAAT DI KOTA PADANG (1988-1998)."

³⁶ Yaasokhi Tafonao, "Theological Study on Leadership with Integrity and Its Relevance for the Contemporary Church," *VISIO DEI: JURNAL TEOLOGI KRISTEN* 6, no. 1 (2024): 41–52.

³⁷ Zein Marshellin Rante dan Friska Yani Baaka, "KONFLIK INTERPERSONAL DALAM JEMAAT MULA-MULA: TANTANGAN PASCA YESUS BAGI PARA RASUL," *NETIZEN: JOURNAL OF SOCIETY AND BUSINESS* 2, no. 1 (2025): 1–12.

transparansi kepemimpinan, menegakkan prinsip-prinsip moral yang tinggi, serta kembali berorientasi pada pelayanan yang tulus. Kepercayaan jemaat terhadap kepemimpinan gereja adalah faktor penting dalam keberlanjutan pelayanan gereja. Jika pemimpin gereja lebih berfokus pada politik kekuasaan daripada pelayanan, maka jemaat akan kehilangan rasa hormat dan kepercayaan terhadap mereka. Ketika gereja gagal mempertahankan integritas kepemimpinan, jemaat cenderung mengalami kekecewaan yang mendalam, yang pada akhirnya dapat menyebabkan mereka berpaling dari gereja atau mencari komunitas lain yang lebih stabil.

Strategi Membangun Kepemimpinan Gereja yang Sehat

Kepemimpinan dalam gereja memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas spiritual, sosial, dan administratif jemaat. Namun, tantangan yang sering muncul adalah bagaimana memastikan kepemimpinan gereja tetap sehat, berorientasi pada pelayanan, dan tidak terjebak dalam dinamika politik kekuasaan yang dapat merusak kesatuan tubuh Kristus. Alkitab memberikan pedoman yang jelas tentang prinsip kepemimpinan gereja yang ideal, seperti yang diajarkan dalam *1 Petrus 5:2-3*, yaitu bahwa seorang pemimpin gereja harus menggembalakan jemaat dengan sukarela, tidak karena paksaan atau ambisi pribadi, melainkan sebagai teladan bagi jemaat. Untuk itu, diperlukan strategi konkret dalam membangun kepemimpinan gereja yang sehat, di antaranya dengan menerapkan prinsip kepemimpinan Kristiani dalam pemilihan pengurus gereja, membangun budaya jemaat yang mendukung kepemimpinan berbasis kasih dan pelayanan, serta mengoptimalkan peran gembala sidang dalam mengawasi dan mencegah praktik politik kekuasaan dalam gereja.

Menerapkan Prinsip Kepemimpinan Kristiani dalam Pemilihan Pengurus Gereja

Pemilihan pengurus gereja harus dilakukan berdasarkan prinsip kepemimpinan Kristiani yang menekankan nilai-nilai integritas, pelayanan, dan kesetiaan terhadap firman Tuhan. Dalam *1 Timotius 3:1-7*, Paulus memberikan kriteria bagi seorang pemimpin gereja yang tidak hanya memiliki kemampuan kepemimpinan, tetapi juga karakter moral yang kuat, seperti tidak serakah, tidak suka bertengkar, dan memiliki kesaksian yang baik di tengah jemaat. Sayangnya, dalam praktiknya, pemilihan pengurus gereja sering kali diwarnai oleh faktor subjektif seperti kedekatan dengan tokoh tertentu atau pengaruh politik internal gereja, yang berpotensi mengabaikan standar spiritual yang telah ditetapkan dalam Alkitab. Untuk memastikan pemilihan pengurus gereja berjalan sesuai dengan prinsip Kristiani, gereja perlu menerapkan mekanisme seleksi yang lebih transparan dan berbasis meritokrasi spiritual. Tafonao menekankan bahwa gereja yang memiliki sistem pemilihan berbasis evaluasi karakter dan spiritualitas pemimpin cenderung memiliki kepemimpinan yang lebih efektif

dan minim konflik.³⁸ Gereja dapat membentuk panitia pemilihan independen yang bertanggung jawab dalam menyeleksi calon pemimpin berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Alkitab, bukan hanya berdasarkan popularitas atau kepentingan politik tertentu. Dengan demikian, gereja dapat memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar memiliki panggilan untuk melayani, bukan sekadar mengejar jabatan atau pengaruh dalam komunitas jemaat.

Membangun Budaya Jemaat yang Mendukung Kepemimpinan yang Berdasarkan Kasih dan Pelayanan

Budaya jemaat yang sehat berperan penting dalam menciptakan kepemimpinan gereja yang kuat dan harmonis. Jemaat yang memahami bahwa kepemimpinan dalam gereja adalah bentuk pelayanan, bukan kekuasaan, akan lebih mendukung pemimpin yang bekerja dengan hati yang tulus. Dalam *Filipi 2:3-4*, Paulus mengajarkan agar setiap orang tidak mencari kepentingan sendiri, tetapi mengutamakan kepentingan bersama, terutama dalam konteks pelayanan gerejawi. Oleh karena itu, gereja perlu menanamkan nilai-nilai ini kepada jemaat agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam mendukung kepemimpinan yang benar.

Menurut Rante & Baaka, gereja yang berhasil membangun budaya jemaat berbasis kasih dan pelayanan memiliki tingkat konflik kepemimpinan yang lebih rendah, karena jemaat lebih berorientasi pada kesatuan tubuh Kristus daripada pada perbedaan kepentingan pribadi.³⁹ Salah satu strategi yang dapat diterapkan gereja adalah dengan mengadakan pembinaan kepemimpinan bagi jemaat, sehingga mereka memahami prinsip kepemimpinan Kristiani dan mampu mendukung pemimpin yang telah dipilih. Selain itu, gereja juga dapat membentuk kelompok-kelompok kecil yang berfungsi untuk membangun relasi antarjemaat serta memperkuat komunikasi antara pemimpin dan anggota gereja.

Peran Gembala Sidang dalam Pengawasan dan Reproduksi Politik Kekuasaan dalam Gereja

Meskipun secara umum dipandang sebagai pemimpin moral dan spiritual, posisi strategis seorang gembala dalam gereja menjadikannya rentan untuk terlibat dalam dinamika konflik kekuasaan internal. Dalam praktiknya, gembala tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan rohani, tetapi juga memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan administratif yang kerap menimbulkan ketegangan dan bahkan konflik, terutama ketika kontrol kelembahkn yang seimbang tidak diterapkan. Studi kasus dalam penelitian Aldo menunjukkan bahwa konsentrasi kekuasaan pada figur gembala

³⁸ Tafonao, "Theological Study on Leadership with Integrity and Its Relevance for the Contemporary Church."

³⁹ Rante dan Baaka, "KONFLIK INTERPERSONAL DALAM JEMAAT MULA-MULA: TANTANGAN PASCA YESUS BAGI PARA RASUL."

sidang dapat memicu konflik kepemimpinan, terutama ketika otoritas tersebut tidak dijalankan secara transparan dan partisipatif.⁴⁰ Oleh karena itu, penting untuk menyoroti secara lebih spesifik bagaimana peran gembala sidang tidak hanya terbatas pada fungsi pembinaan spiritual, tetapi juga mencakup aspek pengawasan serta reproduksi politik kekuasaan di dalam tubuh gereja. Kesadaran akan posisi strategis gembala dalam dinamika kekuasaan menuntut refleksi mendalam mengenai bagaimana peran tersebut dijalankan, khususnya dalam menjaga integritas, kesatuan, dan etika kepemimpinan di dalam tubuh gereja.

Gembala sidang memiliki peran kunci dalam menjaga kemurnian kepemimpinan gereja dengan memastikan bahwa gereja terbebas dari praktik politik kekuasaan yang dapat merusak kesatuan jemaat. Sebagai pemimpin spiritual, seorang gembala harus meneladani prinsip kepemimpinan Yesus, yang menekankan pelayanan dan bukan dominasi. Dalam *Matius 20:26-28*, Yesus mengajarkan bahwa siapa yang ingin menjadi pemimpin harus terlebih dahulu menjadi pelayan. Hal ini menegaskan bahwa seorang gembala tidak hanya bertugas sebagai pengajar firman Tuhan, tetapi juga sebagai pengawas moral dan etika dalam kehidupan gereja.

Menurut Sucipto, peran gembala sidang bukan hanya sebagai pemimpin rohani, tetapi juga sebagai penjaga harmoni jemaat dalam menghadapi tantangan internal gereja. Studi tersebut menemukan bahwa gereja yang memiliki gembala yang berperan aktif dalam mengawasi dan mengarahkan kepemimpinan gereja cenderung lebih stabil dan minim konflik dibandingkan dengan gereja yang membiarkan dinamika politik kekuasaan berkembang tanpa pengawasan.⁴¹ Oleh karena itu, gembala sidang perlu memastikan bahwa setiap keputusan dalam gereja didasarkan pada prinsip kebenaran dan keadilan serta memberikan ruang bagi dialog dan rekonsiliasi di antara jemaat.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis, peran gembala sidang yang aktif dalam mengawasi kepemimpinan gereja sangat penting dalam mencegah konflik internal yang timbul akibat ambisi kekuasaan. Gereja yang memiliki gembala sidang yang berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan perbedaan pendapat cenderung lebih stabil dibandingkan dengan gereja yang membiarkan konflik berkembang tanpa intervensi. Dengan demikian, gembala sidang harus memastikan bahwa setiap keputusan dalam gereja didasarkan pada prinsip kebenaran dan keadilan, serta memberikan ruang bagi dialog dan rekonsiliasi agar tercipta harmoni dalam jemaat.

⁴⁰ Reinaldo Senewe, Mariam Sondakh, dan Stefi Helistina Harilama, "Peran Komunikasi Antarpribadi Gembala dalam mengatasi Konflik di Jemaat GPDI Betlehem Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa," *ACTA DIURNA KOMUNIKASI* 5, no. 1 (2023): 8.

⁴¹ David Sarju Sucipto, "Tanggung Jawab Gembala Terhadap Jemaat Berdasarkan Surat 1 Petrus: Suatu Tinjauan Biblikal," *Jurnal Teologi Nusantara* 2, no. 1 (2024): 21–35.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa politik kekuasaan dalam gereja merupakan fenomena yang dapat berdampak negatif terhadap kepemimpinan jemaat, baik dalam aspek spiritual, sosial, maupun administrasi gereja. Politik kekuasaan sering kali muncul dalam bentuk perebutan jabatan, kampanye negatif terhadap calon pemimpin tertentu, serta upaya menjatuhkan lawan demi mempertahankan atau merebut posisi kepemimpinan. Dampak dari politik kekuasaan ini meliputi perpecahan jemaat, menurunnya efektivitas pelayanan gereja, serta hilangnya kepercayaan jemaat terhadap kepemimpinan gerejawi. Dalam banyak kasus, konflik kepemimpinan akibat politik kekuasaan menyebabkan jemaat lebih berfokus pada persaingan internal daripada pada pertumbuhan rohani dan pelayanan kepada sesama.

Dari perspektif teologi Alkitabiah, kepemimpinan dalam gereja seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai pelayanan, kasih, dan integritas moral. Yesus sendiri menekankan dalam *Matius 20:25-28* bahwa kepemimpinan bukanlah soal dominasi, tetapi pelayanan kepada jemaat. Demikian pula, *Filipi 2:3-4* mengajarkan pentingnya menghindari ambisi pribadi dalam kepemimpinan gereja. Namun, dalam praktiknya, masih banyak gereja yang menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan beberapa solusi untuk membangun kepemimpinan gereja yang sehat, termasuk menerapkan sistem pemilihan pemimpin yang transparan dan berbasis kriteria spiritual, membangun budaya jemaat yang mendukung kepemimpinan yang berbasis kasih, serta memperkuat peran gembala sidang sebagai pengawas moral dalam kepemimpinan gereja.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan Alkitabiah secara konsisten, gereja dapat menghindari dampak negatif dari politik kekuasaan dan memastikan bahwa kepemimpinan yang terbentuk benar-benar berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan jemaat. Oleh karena itu, penting bagi setiap gereja untuk membangun sistem kepemimpinan yang lebih berbasis spiritualitas, keadilan, dan kasih, sehingga dapat menjaga integritas serta stabilitas jemaat dalam menghadapi tantangan politik kekuasaan di dalam gereja.

REFERENSI

- Adrian, Tonny, dan Dirk Roy Kolibu. "TEOLOGI PAK DALAM MEMBENTUK KARAKTER KEPEMIMPINAN PANCASILA: KAJIAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEPEMIMPINAN KRISTEN BERDASARKAN KITAB NEHEMIA." *Inculco Journal of Christian Education* 5, no. 1 (Februari 2025): 61–83.
- Alexander Arifianto. "Faith, Moral Authority, and Politics: The Making of Progressive Islam in Indonesia." *Academia.edu*.
- Bashri, Yanto. "Kiai in Indonesian Social-Political Changes." *Journal of Nahdlatul Ulama Studies* 2, no. 1 (2021): 67–88.
- Djawa, Maya, Nofriana Baun, dan Yakobus Adi Saingo. "Manajemen Pendidikan Politik Menurut Martin Luther." *Jurnal Media Informatika* 6, no. 2 (2024): 447–452.
- Harti, Sri Dwi, Tolop Oloan Marbun, Yunus Selan, dan Adi Putra. "Politics Identity in Christian Perspective and the Implication for Christian Politicians in Indonesia." *Pharos Journal of Theology* 104, no. 4 (2023).
- Hoon, Chang-Yau. "Religious aspirations among urban Christians in contemporary Indonesia." *International Sociology* 31, no. 4 (Juli 2016): 413–431.
- Kundjarijati, Efi Linda, dan Fibry Jati Nugroho. "Peranan Gaya Kepemimpinan terhadap Keterlibatan Generasi Milenial dalam Pelayanan di Jemaat Kristen Indonesia Mahanaim Blitar." *Coram Mundo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 6, no. 2 (2024): 15–27.
- Kurung, Windi Marandja, Mervid Deverson Nee, Oditha Hutabarat, dan Hotman Siagian. "MEMBANGUN GEREJA YANG DINAMIS DI ERA MODERN: ANALISIS PENERAPAN 12 PRINSIP PERTUMBUHAN GEREJA CHARLES PETER WAGNER DI GEREJA BETHEL INDONESIA" THE SEED" YOGYAKARTA." *Jurnal Teologi Wesley* 1, no. 2 (2024).
- Laia, Surimawati, dan Yuslina Halawa. "Sejarah Gereja di Indonesia: Peran Misionaris Dalam Penyebaran Kekristenan." *Jurnal Silih Asah* 2, no. 1 (2025): 1–13.
- Manurung, Bistok, Robert Paul Trisna, dan Yusak Setianto. "Teologi Persahabatan Kristen dan Dalihan Na Tolu: Integrasi Nilai-Nilai Kultural dalam Konteks Pelayanan." *Matheo: Jurnal Teologi/Kependetaan* 11, no. 2 (2021): 246–259.
- Putrawan, Bobby K, dan Ramly D B Lumintang. "Studi Eksplanatori Kepemimpinan Transformasional Terhadap Keesaan Gereja Sebagai Tubuh Kristus Di Sinode Gereja Kristus Rahmani Indonesia." *THEOSOPHIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 2, no. 2 (2024): 94–103.

- Rante, Zein Marshellin, dan Friska Yani Baaka. “KONFLIK INTERPERSONAL DALAM JEMAAT MULA-MULA: TANTANGAN PASCA YESUS BAGI PARA RASUL.” *NETIZEN: JOURNAL OF SOCIETY AND BUSINESS* 2, no. 1 (2025): 1–12.
- Rantesalu, Marsi Bombongan. “Karakter Kejujuran dalam Gereja Masa Kini.” *Jurnal Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 1 (Juni 2020): 43.
- RIONALDI, SIJABAT. “KONFLIK DUALISME KEPEMIMPINAN HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN TERHADAP JEMAAT DI KOTA PADANG (1988-1998).” Universitas Andalas, 2024.
- RUMKENY, R. M. (ROSWELL). “BIOGRAFI JONATAN PRIBADI: PENGIKUT KRISTUS, GEMBALA SIDANG DAN PEMIMPIN ORGANISASI YANG BERDAMPAK” (Oktober 2024).
- Senewe, Reinaldo, Mariam Sondakh, dan Stefi Helistina Harilama. “Peran Komunikasi Antarpribadi Gembala dalam mengatasi Konflik di Jemaat GPDI Betlehem Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa.” *ACTA DIURNA KOMUNIKASI* 5, no. 1 (2023): 8.
- Sianturi, Joyanda. “Kontribusi Kepemimpinan Pimpinan Sidang Terhadap Pertumbuhan Gereja Pentakosta Indonesia Se-Jabodetabek.” *HAGGADAH: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 5, no. 2 (2024): 104–119.
- Simanjuntak, Dapot Tua, dan Joseph Christ Santo. “Kepemimpinan Gembala Sidang Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Jemaat: Sebuah Refleksi 1 Petrus 5.” *Jurnal Paria* 6, no. 1 (2019).
- Situmorang, Meditatio. “Tantangan Perkembangan Oikumene di Indonesia.” *Lumen: Jurnal Pendidikan Agama Katekese dan Pastoral* 3, no. 2 (2024): 190–202.
- Subanar, Gregorius Budi. “THE DYNAMICS OF THE CATHOLIC CHURCH IN INDONESIA.” *Gema Teologi* 32, no. 1 (April 2008).
- Sucipto, David Sarju. “Tanggung Jawab Gembala Terhadap Jemaat Berdasarkan Surat 1 Petrus: Suatu Tinjauan Biblika.” *Jurnal Teologi Nusantara* 2, no. 1 (2024): 21–35.
- Sumual, Ivonne Sandra, Susanna Kathryn, Abraham Giovanni Immanuel, dan Yemima El-roi Pasulu. “Hildegard of Bingen dan Pendidikan Teologi bagi Perempuan: Inspirasi bagi Program Pelatihan Wanita Bethel.” *RHEMA: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika* 9, no. 1 (2024): 36–45.
- Tafonao, Yaasokhi. “Theological Study on Leadership with Integrity and Its Relevance for the Contemporary Church.” *VISIO DEI: JURNAL TEOLOGI KRISTEN* 6, no. 1 (2024): 41–52.
- Tobing, Rodlany A Lbn. “Manjomput na Sinurat: Mencegah Konflik Perebutan Kekuasaan di

Gereja dalam Pemilihan Pemimpin Tertinggi HKBP.” *Jurnal Teologi Rahmat* 6, no. 2 (2020): 78–91. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/84433728/10-libre.pdf?1650333934=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DManjomput_Na_Sinurat_Mencegah_Konflik_Pe.pdf&Expires=1743822667&Signature=GEf9fmkIRtfbgULUI7ysvf6lEpIiKEO1NRvdw1QFnUu7OzvN4M6v7DiUPO9.

Tua, Sahat, James Pasaribu, dan Dorozoria Sianturi. “INTERNALISASI PRINSIP KEPEMIMPINAN YANG MENGHAMBA BAGI MAHASISWA INSTITUT AGAMA KRISTEN RENATUS PEMATANG SIANTAR.” *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 6 (2024): 12859–12865.

Wattimury, Costansa, dan Pelita Hati Surbakti. “Urgensi Standar Kompetensi Pendeta: Tinjauan terhadap Dokumen Standar Kompetensi Pendeta di Sinode Gereja Kristus.” *Immanuel: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 5, no. 2 (Oktober 2024): 117–140.

Yohanes, Heppy, Yakub Hendrawan Perangin Angin, dan Tri Astuti Yenirenowati. “HL Senduk dan Kegerakan Pentakosta di Indonesia.” *Ritornera - Jurnal Teologi Pentakosta Indonesia* 1, no. 3 (Desember 31, 2021): 101–114.
<https://ojs.pspindonesia.org/index.php/JPI/article/view/25>.

Yunanto, Sri, dan Angel Damayanti. “Religion and Power: Comparing Political Landscape in the Religious Conflicts in Poso and Maluku.” *Advances in Politics and Economics* 5, no. 1 (Januari 2021): p99.